

Maintenance of Democracy Values in Village Government Through “BPD” Organization Activities

Aris Kharisma Permana

Program Studi PPKn, Universitas Islam Nusantara, Bandung
aris_kp@gmail.com

ODANG SUPARMAN

Program Studi PPKn, Universitas Islam Nusantara, Bandung
odangsuparman53@gmail.com

Abstract

Village Consultative Organization (BPD) is an element of the institution in organizing Village government. Democratic values can be realized if the BPD has carried out its role well so that the emergence of democratic values, namely the participation in democratic activities, freedom of opinion and cooperation in solving problems. This study uses a qualitative approach with descriptive analytical methods. Based on the results of the study, it was found that the role of the Village Consultative Body (BPD) of Panyadap Village had been said to play a role in increasing the democratic value of the village government, because in carrying out their duties and roles the performance was optimal. The level of participation of the Panyadap Village community is quite active in every existing democratic activity, such as legislative elections, RT / RW elections and participating in deliberations with BPD members so that they can increase democratic values such as freedom, respect for diversity and change of leadership. faced by the BPD in improving democratic values in Panyadap Village government is the busyness of the BPD administrators themselves as well as facilities and budgets to support their duties as members of the BPD. need to be addressed, urging the public to have a role as a supervisor or monitoring in addition to channeling aspirations.

Keyword: Democratic Value, Village Government, BPD Activities

Part of the contents in journal:

STRENGTHENING OF GOTONG ROYONG VALUE IN COMMUNITIES THROUGH LEADERSHIP.....	77
MAINTENANCE OF DEMOCRACY VALUES IN VILLAGE GOVERNMENT THROUGH BPD ORGANIZATION ACTIVITIES.....	91
STRENGTHENING CITIZENSHIP EDUCATION AS LEGAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION.....	103
ESTABLISHMENT OF SOCIAL CARE CHARACTERS IN THE SOCIETY THROUGH POLITICAL PARTIES	123
MORALITY OF URBAN TEENAGERS IN RELIGIOUS AND SOCIAL VIEW ANGLE.....	141

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Nilai demokrasi dapat terwujud apabila BPD sudah menjalankan peranannya dengan baik sehingga akan munculnya nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi dalam kegiatan berdemokrasi, adanya kebebasan berpendapat dan adanya kerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panyadap sudah dikatakan berperan dalam meningkatkan Nilai demokrasi pemerintahan Desa, karena dalam melaksanakan tugas dan peran kinerjanya sudah optimal. Tingkat partisipasinya masyarakat Desa Panyadap cukup aktif dalam setiap kegiatan demokrasi yang ada, seperti pemilihan legislatif, pemilihan RT/RW dan ikut serta dalam musyawarah dengan anggota BPD sehingga dapat meningkatkan nilai demokrasi seperti adanya kebebasan, menghargai keanekaragaman dan adanya pergantian kepemimpinan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam meningkatkan Nilai demokrasi di pemerintahan Desa Panyadap adalah Kesibukan para pengurus BPD itu sendiri serta fasilitas dan anggaran untuk menunjang dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD. Solusi yang dilakukan BPD dalam rangka meningkatkan Nilai demokrasi pemerintahan Desa Panyadap adalah mengevaluasi kinerja karena banyak hal yang perlu dibenahi, Menghimbau masyarakat harus ikut berperan sebagai pengawas atau monitoring selain menyalurkan aspirasi.

Kata Kunci: *Nilai Demokrasi, Pemerindahan Desa, Kegiatan BPD*

PENDAHULUAN	2014 pasal 55 Badan Permusyawaratan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa (BPD) berfungsi “Menetapkan
adalah unsur lembaga dalam	peraturan Desa bersama kepala Desa,
penyelenggaraan pemerintahan Desa.	menampung dan menyalurkan aspirasi
Peran BPD sangat penting, karena sebagai	masyarakat, melakukan pengawasan
unsur lembaga yang paling dekat dengan	kinerja kepala Desa”. Peran dan fungsi
masyarakat. Oleh karena itu, sesuai	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dengan tujuan dibentuknya BPD	dalam meningkatkan nilai demokrasi
diharapkan dapat terwujudnya suatu	masyarakat, BPD harus menjalankan peran
proses demokrasi yang baik dimulai dari	dan fungsinya terlebih dahulu sehingga
sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.	terbentuk sikap demokrasi dalam
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun	masyarakat. Demokrasi mempunyai nilai-

nilai demokrasi sehingga dapat melihat lebih jelas tentang demokrasi dan tidak adanya perbedaan dalam mengartikan demokrasi.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 4) penelitian kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Adapun teknik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Menurut Alwasilah (2002: 211) “Observasi penelitian adalah pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan perilaku responden secara alami sesungguhnya adalah

manifestasi kode dan aturan dalam suatu budaya, bukan sekedar rutinitas cultural”.

Wawancara

Pengertian wawancara menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 127), adalah “Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu”.

Studi Literatur

Studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data atau informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dijelaskan Nasution (1996: 85) sebagai berikut:

Studi dokumenter terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi, yang dikaji dapat berupa: peraturan-peraturan, program kerja, daftar pengurus dan lain-lain." Studi dokumentasi pada penelitian ini akan lebih banyak yang berupa foto-foto supaya lebih terlihat lebih terlihat bukti-bukti visualnya.

Catatan Lapangan

Catatan Lapangan yang dijelaskan Bogdan dan Bikle dalam buku Moleong (2007: 209), "Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif".

Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif memerlukan data-data atau informasi dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu harus ditentukan subjek penelitian yang dapat

dijadikan sumber informasi tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2002: 32) bahwa :

Dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat dijadikan informasi. Sampel berupa hal peristiwa manusia, situasi yang diobservasi. Sering sampel berupa responden yang dapat diwawancarai. Sampel dipilih secara "*purposive*" bertalian dengan *purpose* atau tujuan tertentu. Sering responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian responden ini diminta pula menunjuk orang lain, dan seterusnya. Cara ini sering disebut "*snowball sampling*" yang dilakukan secara serial atau berurutan.

Tahap Penelitian

Sebuah penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan, jika penelitian itu dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BPD Mempunyai tugas pokok menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepaladesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

a) Peran BPD sebagai Badan Legislatif Desa.

Tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah salah satu contohsupaya terjadinya demokrasi yang baik.BPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di Desa yang diharapkan sebagai perwujudan dari demokrasi yang ada di Desa agar masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dapat tertampung dengan baik dan pembangunan di daerah pedesaan dapat berjalan dengan baik. BPD sekarang ini tidak hanya bisa menjalankan peran dan fungsinya secara biasa-biasa saja. BPD harus bisa meningkatkan nilai demokrasi Pemerintahan Desa supaya masyarakat bisa berperan aktif kembali dalam berdemokrasi. Tetapi kenyataannya dilapangan BPD kurang terlihat kinerjanya

dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya itu sendiri.

Selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD juga mempunyai peran membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menurut bapak WN selaku anggota BPD Desa Panyadap telah melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Panyadap pada tanggal 18 juni 2013 serta menghasilkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Panyadap Tahun 2013. Mengingat dalam hidup bermasyarakat tidak selamanya berjalan lancar, bahkan sering terjadi pelanggaran hukum, maka harus juga dipelajari kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum. (Suparman & Saloko, 2017).

a. Peran BPD sebagai Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan desa dan Kinerja Pemerintah Desa.

Peran BPD juga mempunyai fungsi sebagai kontrol terhadap pengawasan kinerja Pemerintah Desa, pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa. Menurut hasil wawancara nilai demokrasi pemerintahan Desa Panyadap, diketahui belum berperan dalam meningkatkan nilai demokrasi karena dalam melaksanakan tugas dan peran pokoknya pun belum optimal. Peranan BPD dan Pemerintah Desa Panyadap berjalan dengan baik atau tidaknya BPD tergantung dari penilaian Pemerintah Desa dan masyarakat terhadap kinerja BPD itu sendiri. Sesuai dengan hasil observasi BPD Desa Panyadap cenderung pasif karena BPD bekerja ketika ada suatu masalah saja dan kegiatan yang penting saja. Selain menyalurkan dan menampung aspirasi

masyarakat peran BPD juga berfungsi sebagai pengawasan kinerja BPD dan Pemerintahan desa cukup baik, terbukti dengan adanya sosialisasi terhadap program baru yang di buat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil pembahasan di atas BPD Desa Panyadap sudah menjalankan peranannya dengan baik sehingga menghasilkan nilai demokrasi di masyarakat yang baik. Menurut Asyikuri Ibn Chamim dkk (2003) menguraikan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sebagai berikut: kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi) menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama. Berdasarkan penelitian, masyarakat Desa Panyadap sudah membentuk nilai demokrasi terbukti dengan adanya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu, adanya kebebasan berpendapat

dalam setiap musyawarah, dan adanya kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah baik itu antara anggota BPD ataupun BPD dengan Pemerintah desa maupun masyarakat.

Dari peranan BPD di atas, sebagai legislatif desa dan sebagai Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan desa dan Kinerja Pemerintah Desa, peranannya sudah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai demokrasi seperti di bawah ini :

1. Menekan penggunaan kebebasan seminimal mungkin

Dari hasil penelitian masyarakat sudah bebas memilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau dalam pemilihan kepala desa. Bebas dalam mengeluarkan pendapat sesuai dengan etika dalam bermusyawarah bersama anggota BPD maupun bersama kepala desa.

2. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur

Desa Panyadap melakukan pergantian kepemimpinan kepala desa selama lima tahun sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pemilihan anggota BPD dari masa jabatan anggota yang lama diganti menjadi masa jabatan anggota BPD baru.

3. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai

Pemerintahan desa panyadap untuk meningkatkan nilai demokrasi masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah menjalankan nilai demokrasi.

4. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman

Anggota BPD desa panyadap sangat menghargai perbedaan status pendidikan antara anggota BPD,

menghargai setiap perbedaan pendapat dalam musyawarah sehingga tidak ada konflik dan perselisihan antar masyarakat.

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

Partisipasi masyarakat Desa Panyadap terbilang aktif dalam nilai demokrasi dilihat dari kesadaran dari masyarakatnya sendiri tinggi dalam nilai demokrasi di Desa Panyadap

contohnya seperti dalam Pilkades, Pemilu, dan juga musyawarah yang diadakan oleh BPD. Nilai demokrasi masyarakat Desa disebut terbilang aktif karena dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berdemokrasi seperti Pemilu, Pilkades, dan sampai pemilihan ketua RW dan RT tingkat partisipasinya sudah cukup baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang baik dalam berdemokrasi di Desa Panyadap, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat Desa Panyadap yang cukup baik juga. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Partisipasi masyarakat di Desa Panyadap selain berpartisipasi secara langsung seperti ikut serta

dalam musyawarah tingkat RT/Rw maupun ditingkat Pemerintah Desa, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Desa. Masyarakat juga ikut berpartisipasi secara tidak langsung seperti dalam hal menyampaikan aspirasi yang menyangkut tentang permasalahan yang terjadi di Desa Panyadap kepada anggota BPD agar dapat langsung di tanggapinya kemudian dibahas dalam musyawarah di tingkat Pemerintahan Desa.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Panyadap terbilang aktif dalam meningkatkan nilai demokrasi walaupun tingkat pendidikan masyarakatnya berbeda tapi kesadaran dari masyarakatnya sendiri cukup baik dalam

melaksanakan demokrasi di Pemerintah Desa Panyadap. Itu terlihat dari keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, Pilkades sampai pemilihan ditingkat RT tingkat partisipasinya masyarakat terlihat aktif. Tetapi masyarakat harus selalu ada yang mengajaknya terlebih dahulu dan biasanya oleh tokoh masyarakat atau orang-orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sesuai hasil observasi partisipasi masyarakat Desa Panyadap dalam berdemokrasi terlihat dalam tingkat partisipasinya dalam setiap kegiatan demokrasi yang ada dimasyarakat seperti Pemilu, Pilkades, dan pemilihan ketua RW dan RT.

Dalam Napitupulu (2007: 118) menyatakan bahwa Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi orientasi atau sikap dan perilaku anggota perwakilan sehingga

itu dapat menjalankan fungsi dan perannya yaitu faktor keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan dan keberadaan organisasi otonom yang mengaktifkan kehidupan masyarakat setempat dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan kendala-kendala yang dihadapi BPD di Desa Panyadap karena kesibukan para pengurus untuk pekerjaan yang lain membuat kinerja BPD sebagai lembaga perwakilan belum berjalan baik. Dalam segala hal pasti tidak terlepas dari adanya kendala-kendala, termasuk kendala yang dihadapi oleh BPD dalam meningkatkan nilai demokrasi pemerintahan di Desa Panyadap. BPD Desa Panyadap memiliki kendala yang hampir sama dengan kebanyakan organisasi lain. Kendala yang dihadapi oleh anggota BPD adalah :

- a. Kesibukan Anggota BPD
- b. Fasilitas, biaya dan Pendapatan.
- c. Tingkat Pendidikan.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang

dihadapi BPD Desa Panyadap adalah pertama kesibukan para pengurus BPD itu sendiri, kedua pendanaan BPD, ketiga tentang fasilitas yang kurang memadai dan keempat banyak masyarakat biasa yang tidak mengetahui sama sekali tentang peran dan tugas BPD itu sendiri. Kendala-kendala tersebut harus segera dibenahi agar kinerja dari BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat bisa berjalan sesuai fungsinya dan. Sesuai hasil observasi kendala-kendala utama BPD Desa Panyadap disebabkan oleh kesibukan masing-masing anggota BPD dan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pemerintahan Desa Panyadap. Solusi yang dilakukan oleh para anggota BPD Desa Panyadap adalah :

- a. Evaluasi
Mengevaluasi kinerja karena

banyak hal yang perlu dibenahi. Menurut Subarsono (2008: 119) bahwa evaluasi

adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu lembaga, badan dan kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau hal tersebut sudah berjalan walaupun tidak ada batasan waktu sebuah lembaga atau kebijakan harus dievaluasi. Dengan adanya evaluasi maka kendala-kendala yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

b. Monitoring.

Selanjutnya hasil dari evaluasi tersebut yaitu kinerja yang akan dilakukan kedepan lebih terarah agar permasalahan yang telah terjadi dapat teratasi seperti program kerja yang telah disusun dapat terlaksana. Selain dari para anggota BPD Desa Panyadap yang harus mengevaluasi kinerjanya, masyarakat harus memiliki peran sebagai pengawas atau monitoring selain menyalurkan aspirasi. Kinerja BPD tidak selamanya sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu monitoring dari masyarakat terhadap kinerja BPD sangat diperlukan. Menurut Subarsono (2008:

113) bahwa monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Kesimpulan

Peran BPD Desa Panyadap sudah dapat dikatakan berperan dalam meningkatkan nilai demokrasi pemerintahan Desa, karena dalam melaksanakan tugas dan peran kinerjanya sudah optimal, peran BPD sebagai pengawasan kinerja Pemerintah Desa dan pelaksanaan peraturan desa cukup aktif karena ikut serta dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dalam menyepakati rancangan perdes, berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi, adanya kebebasan berpendapat dalam musyawarah serta adanya kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga dapat meningkatkan nilai demokrasi seperti kebebasan

berpendapat, melakukan pergantian kepemimpinan, dan menghargai adanya keanekaragaman.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Panyadap cukup aktif dalam setiap kegiatan demokrasi yang ada, seperti pemilihan legislatif, pemilihan RT/RW (Partisipasi langsung) dan ikut serta dalam musyawarah dengan anggota BPD (partisipasi tidak langsung).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam meningkatkan nilai demokrasi di pemerintahan Desa Panyadap adalah Kesibukan para pengurus BPD itu

sendiri, Pendanaan BPD yang terbilang masih kurang dari segi anggaran dan fasilitas untuk menunjang dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD, dan Masyarakat biasa belum mengetahui tentang peran dan tugas BPD.

Solusi yang dilakukan BPD dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pemerintahan Desa Panyadap adalah mengevaluasi kinerja karena banyak hal yang perlu dibenahi, Menghimbau masyarakat harus ikut berperan sebagai pengawas atau monitoring selain menyalurkan aspirasi.

Daftar Pustaka

- AG, Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002, Pokoknya Kualitatif (Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif). Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moleong. Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paimin. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: PT Alumni.
- Nasution. S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- _____. 2002. Metode Penelitian Naturalistik Inkuiri. Bandung: Tarsito.
- Nazir. M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminto. 1996. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suparman, O., & Saloko, A. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara (UNINUS).